



**PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA**

**PERUBAHAN
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

**BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH** ★

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Penyusunan perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 57 tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020. Perubahan dimaksud memperhatikan ketentuan pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara, pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bahwa RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, RPKD Perubahan tahun 2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan PPAS yang dijadikan sebagai bagian dari proses penyusunan APBD Perubahan tahun 2020. Dan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, bahwa hasil evaluasi asumsi pendapatan Tahun 2020 mengalami penurunan dari asumsi awal APBD Tahun 2020.

Salah satu hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan asumsi pendapatan yaitu adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Hal ini juga berdampak pada penyaluran transfer ke daerah dan dana desa tahun 2020 juga mengalami penyesuaian. Berbagai regulasi diterbitkan oleh Pemerintah dalam rangka penanganan pandemi corona virus disease 2019 (COVID-19) dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional

serta stabilitas sistem keuangan. Berbagai regulasi tersebut antara lain Peraturan Presiden 54 tahun 2020, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020, hingga Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020. Sedangkan di daerah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga menerbitkan regulasi berkenaan transfer antar daerah, salah satunya melalui Surat Gubernur Nomor : 900/2552/0708-III/BPKAD, Tanggal 14 April 2020 Tentang Pemotongan Belanja Bantuan Keuangan dan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota Tahun 2020.

Adanya perubahan pada sisi pendapatan tentunya berdampak pada belanja. Pada tahun 2020, belanja daerah sebagai sebagaimana diamanatkan ketentuan perundang-undangan, prioritasnya adalah untuk penanganan pandemi corona virus disease 2019 (COVID-19). Hal itu tercermin pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020, dimana daerah diminta melakukan penyesuaian belanja.

Pada tahun 2020, berdasarkan hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2019, terdapat nilai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA). Dimana dalam komponen SiLPA tersebut juga terdapat hal yang perlu diperhatikan antara lain yaitu utang jangka pendek lainnya dan beban.

Hal-hal sebagaimana dimaksud, merupakan gambaran hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sampai dengan triwulan II pada tahun berjalan 2020.

Dengan adanya perubahan asumsi pendapatan daerah, Belanja daerah dan pembiayaan tersebut, maka diperlukan perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2020, sebagai bagian dari proses Perubahan APBD Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA APBD

Tujuan penyusunan perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah:

- a) Menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran;
- b) Memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan Perubahan RKPD 2020 ;
- c) Mengoptimalkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d) Memastikan bahwa proses pencapaian target prioritas pembangunan daerah dapat terlaksana;
- e) Sebagai dasar dalam penyusunan PPAS Perubahan APBD tahun anggaran 2020.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA APBD.

Dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 5) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- 7) Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025;
- 8) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016, tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara 2016-2021;

- 9) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016, tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 10) Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020.
- 11) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
- 12) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indoensia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
- 13) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancama Yang Membahayakan Perekonomian Nasional.
- 14) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.07/2020 Tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2020.
- 15) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- 17) Keputusan Bupati Nomor 203/SK-BUP/HK/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit

Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

- 18) Peraturan Bupati nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- 19) Surat Gubernur Nomor : 900/2552/0708-III/BPKAD, Tanggal 14 April 2020 Tentang Pemotongan Belanja Bantuan Keuangan dan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota Tahun 2020.
- 20) Surat Keputusan Bupati Nomor 271/SK-BUP/HK/2020 Tanggal 28 Mei 2020 Tentang Pemberian Penundaan Pembayaran, Pengurangan Pembayaran dan Penghapusan Sangsi Administrasi Pajak Daerah, Masa Pajak Maret sampai Agustus 2020.
- 21) Surat Gubernur Nomor : Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 900/5220/1581-III/BPKAD, perihal Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten/Kota.
- 22) Surat Gubernur Nomor : 978/5203/1574-III/BPKAD, Perihal Tambahan Alokasi Belanja Bantuan Keuangan pada Perubahan APBD TA.2020.
- 23) Hasil Klarifikasi Bantuan Keuangan terhadap Kabupaten Kutai Kartanegara Perubahan APBD TA.2020, tanggal 12 September 2020.

BAB II

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD

Pandemi virus COVID-19 atau yang umum disebut virus Corona di masyarakat kian hari semakin menjangkiti Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Kutai Kartanegara pada khususnya. Pandemi Corona (COVID-19) selain berdampak pada aspek kesehatan, juga berdampak pada aspek lainnya, yaitu sosial dan ekonomi. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka memutus rantai penyebaran pandemi ini, mulai mengeluarkan himbauan social distancing, mengeluarkan himbauan untuk Work From Home bagi pegawai, memberlakukan pembatasan Sosial berskala besar (PSBB), penutupan berbagai tempat publik/peribadahan, dan lain-lain. Adanya kebijakan pemerintah ini, tentunya memberikan dampak bagi masyarakat, baik masyarakat menengah ke bawah hingga kalangan elit, sampai pada aktivitas ekonomi terutama produksi, distribusi, dan penjualan akan mengalami gangguan, termasuk dalam dampak dalam aspek ketenagakerjaan yang mempunyai implikasi yang lebih banyak lagi seperti kemiskinan.

Menjadi tugas besar bagi Pemerintah pusat dan daerah terkait dengan pandemi COVID-19 saat ini : pertama, menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakat sebagai fokus utama, dan kedua, menjaga laju sektor ekonomi dan aspek sosial seperti masalah kesehatan, kemiskinan, ketenagakerjaan, pendidikan dan lainnya.

Proses pembangunan daerah tidak terlepas dari optimalisasi belanja Pemerintah sebagai salah satu variabel pendorong pertumbuhan ekonomi daerah, adalah program dan kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan bersama antara Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di dalam APBD Kutai Kartanegara tahun 2020. Namun demikian dalam perjalanannya terdapat beberapa asumsi dasar yang mengalami perubahan, terutama dari aspek sosial, ekonomi dan politik, yang berimplikasi pada kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, sehingga perlu dilakukan pencermatan APBD tahun berjalan sebagai proses evaluasi dan

perbaikan, yang selanjutnya dituangkan dalam Perubahan APBD Kutai Kartanegara 2020.

2.1. Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD

Berdasarkan atas hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan APBD Kutai Kartanegara tahun 2020, inventarisasi kegiatan-kegiatan prioritas pembangunan daerah, dan memperhatikan kebijakan-kebijakan provinsi dan nasional, maka disusun beberapa kebijakan yang mendasari perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan pembangunan Kutai Kartanegara tahun 2020, yakni :

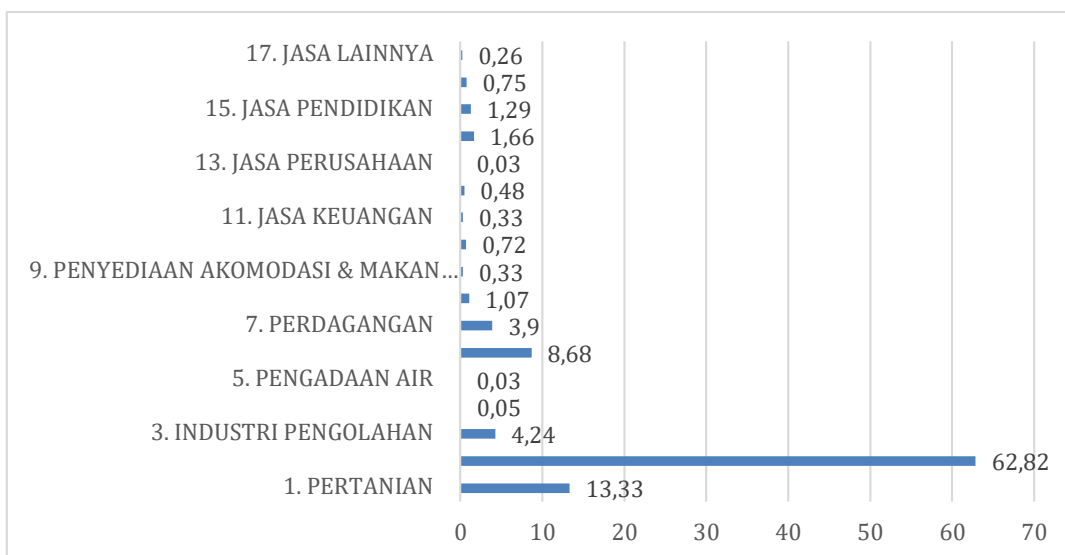
1. Melakukan penyesuaian terhadap asumsi pendapatan daerah yang rasional dengan penuh kehati-hatian serta mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi;
2. Mengoptimalkan belanja wajib dan mengikat serta pelayanan publik berbasis pemanfaatan Teknologi Informasi.
3. Optimalisasi penanganan dampak pandemi COVID-19 secara cepat dan tepat sasaran, baik dari aspek kesehatan, ekonomi dan pelaksanaan jaring pengaman sosial;
4. Memperkuat belanja pemerintah pada sektor-sektor yang memiliki pengaruh langsung terhadap pemulihan perekonomian daerah, seperti aktivitas perdagangan dan jasa, produktivitas pertanian dan infrastruktur sederhana yang melibatkan banyak tenaga kerja, dengan tetap berpegang pada standard protokol pencegahan COVID-19.
5. Meningkatkan cakupan layanan air bersih melalui penyediaan sarana dan prasarana jaringan air bersih ke masyarakat baik yang dilakukan oleh perangkat daerah teknis dan penguatan kapasitas perusda (PDAM).
6. Tindaklanjuti hasil audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2019.

Secara umum asumsi dasar perubahan-perubahan dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. EKONOMI MAKRO

Krisis di bidang kesehatan yang diakibatkan oleh Covid-19 telah memberikan efek domino kepada bidang-bidang yang lain, yaitu sosial, ekonomi, dan keuangan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Pertumbuhan Ekonomi Nasional kuartal II (Q2) 2020 mengalami kontraksi sebesar 5,32 persen year on year (yoy). Angka ini memburuk dari kuartal I (Q1) 2020 yang mencapai 2,97 persen dan Q2 2019 yang mencapai 5,05 persen. Sedangkan untuk Kalimantan Timur mengalami penurunan hingga minus 5,46 persen secara tahunan atau year on year (yoy) dan secara triwulanan, untuk triwulan II/2020, laju ekonomi Kalimantan Timur minus 4,35 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. data tersebut mengindikasikan tidak terjadi pertumbuhan atau semuanya mengalami kontraksi. Begitu pun dengan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kutai Kartanegara, diprediksi akan mengalami kontraksi. Hal ini dapat dijelaskan baik dari sisi permintaan maupun pengeluaran. Dari sisi penawaran, dapat dilihat pada tahun 2019 PDRB atas lapangan usaha Kabupaten Kutai Kartanegara didominasi oleh sektor pertambangan, terutama batu bara yang merupakan fondasi utama dari struktur perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara.

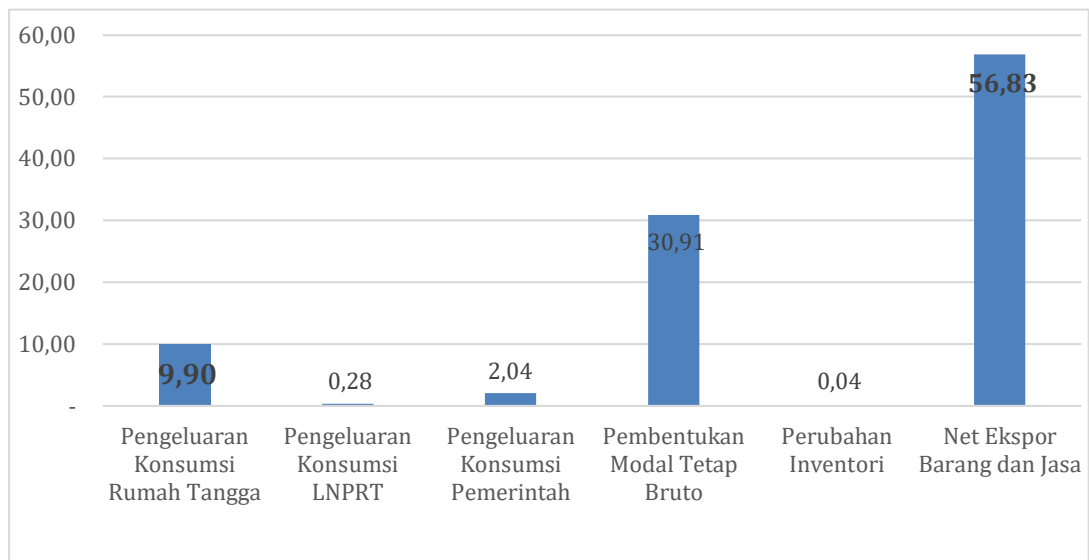
Gambar 1. PDRB ATAS LAPANGAN USAHA 2019



Namun, sepanjang kuartal pertama tahun 2020 ekonomi global mengalami gangguan akibat merebaknya wabah corona virus, dan sudah pasti berdampak pada ekonomi Kutai Kartanegara. Hal ini beralasan mengingat sebelum pandemi Covid-19, sektor pertambangan batu bara sudah mengalami perlambatan. Ketidaknormalan pada masa pandemi akhirnya menyebabkan sektor ini menurun, disebabkan berkurangnya produksi di samping harga batu bara belum menunjukkan tanda-tanda membaik, selain itu keadaan ini tidak lepas dari permintaan batu bara negara tujuan ekspor yang juga turun seiring lockdown di negara tersebut.

Dari sisi permintaan dalam situasi dan kondisi perekonomian yang relatif normal sepanjang tahun 2019, Net Ekspor Barang dan Jasa, Pembentukan Modal Tetap Bruto (Investasi) , serta konsumsi Rumah Tangga mendominasi kontribusi atas PDRB Kabupaten Kartanegara Tahun 2019. Hal ini terlihat pada grafik berikut:

Gambar 2. PDRB ATAS PENGELUARAN 2019



Pada tahun 2019 dari sisi permintaan, sektor konsumsi (Consumption) masyarakat masih menjadi penyumbang yang cukup signifikan bagi perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara, hal ini menjadi indikator daya beli masyarakat dalam kondisi baik, daya beli yang baik maka dampaknya adalah menjaga kondisi perekonomian baik dari inflasi maupun deflasi, serta menjadi dasar kekuatan ekonomi.

Namun dengan adanya pandemi Covid-19 dan kebijakan terkait physical distancing serta kebijakan yang dilakukan dalam rangka memutus penyebaran Covid-19, maka akan mempengaruhi daya beli masyarakat. karena masyarakat sudah tidak beraktivitas di luar rumah sehingga daya beli pun menurun. Tak hanya itu, sektor rumah tangga juga terancam kehilangan pendapatan karena tidak dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan dasarnya terutama bagi keluarga miskin dan rentan di sektor informal, dan efek domino yang terjadi adalah dapat tercipta sebuah stagnasi ekonomi yang dapat membuat peredaran uang tidak berjalan dengan baik dan aktivitas perdagangan juga bisa menjadi tidak bergairah.

Prediksi pertumbuhan ekonomi global dan nasional perlu dijadikan input bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

dalam merancang kebijakan-kebijakan ekonomi terutama dalam menjaga daya beli masyarakat dan menjaga eksistensi perekonomian skala kecil.

Tabel 2.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2015 – 2019

LAPANGAN USAHA	2015	2016	2017	2018*	2019**
1. Pertanian	6,75	2,11	6,50	6,67	4,79
2. Pertambangan dan Penggalian	-10,66	-3,25	0,08	0,43	3,17
3. Industri Pengolahan	4,91	8,61	4,75	6,33	3,88
4. Pengadaan Listrik Dan Gas	28,23	9,63	11,88	14,16	9,38
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,81	7,64	8,94	2,95	4,95
6. Konstruksi	-0,03	-6,91	6,34	7,65	6,05
7. Perdagangan	2,20	4,57	6,15	6,44	5,56
8. Transportasi dan Pergudangan	4,43	6,56	6,10	6,74	5,97
9. Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	5,99	11,26	8,11	7,56	6,58
10. Informasi dan Komunikasi	10,86	9,03	9,57	6,47	7,89
11. Jasa Keuangan	6,21	4,10	3,74	7,10	5,95
12. Real Estate	4,31	-1,30	1,17	3,98	2,79
13. Jasa Perusahaan	-1,77	-7,07	3,55	4,40	3,14
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, & Jaminan Sosial Wajib	13,87	-1,40	-0,62	0,48	2,97
15. Jasa Pendidikan	8,76	12,05	8,97	8,36	7,32
16. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	10,88	12,34	9,45	9,43	9,23
17. Jasa Lainnya	9,12	15,94	8,46	7,52	8,10
PDRB	-7,17	-1,97	1,63	2,12	3,77
PDRB Tanpa Migas	-10,05	-2,46	4,94*	5,16**	
PDRB Tanpa Migas dan Batubara	4,54	1,62	5,73*	6,49**	

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara dengan migas mulai mengalami peningkatan pada tiga tahun terakhir dengan capaian tahun 2019 sebesar 3,77 persen. Peningkatan kembali sektor pertambangan dan penggalian setelah penurunan nilai tambah bruto beberapa tahun lalu memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap kinerja perekonomian daerah, yang disebabkan tingginya dominasi kontribusi pertambangan dan penggalian pada PDRB yang mencapai

62,82 persen pada tahun 2019 dengan kontribusi subsektor tertinggi adalah pertambangan batubara dan lignit. Kinerja pertambangan dan penggalan selain dipengaruhi oleh kapasitas produksi, juga dipengaruhi oleh harga komoditas pasar global dan permintaan pasar, dalam tiga tahun terakhir kapasitas produksi migas Kabupaten Kutai Kartanegara cenderung meningkat, sehingga laju pertumbuhan produksi pertambangan dan penggalan daerah dalam tiga tahun terakhir (2017-2019) selalu tumbuh, yakni berturut-turut 0,08 persen, 0,43 persen dan 3,17 persen.

Pertumbuhan ekonomi tanpa migas, perhitungan PDRB ini dilakukan dengan mengeluarkan Nilai Tambah Bruto (NTB) sub kategori pertambangan minyak dan gas bumi sedangkan subkategori pertambangan dan penggalan lainnya tetap menjadi bagian dari perhitungan PDRB, pendekatan ini dilakukan untuk melihat kinerja perekonomian daerah dengan mengeluarkan produksi komoditas migas dalam sistem perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara. Melalui pendekatan ini laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara juga mengalami kontraksi yang cukup tinggi, pada tahun 2015 sebesar -10,05 persen, dan terus berlanjut ke tahun 2016 dengan pertumbuhan -2,46 persen, dan menunjukkan trend membaik tahun 2017-2018 yakni tumbuh sebesar 4,94 persen dan 5,16 persen.

Pertumbuhan ekonomi tanpa migas dan batu bara, pendekatan perhitungan ini dilakukan untuk melihat kinerja perekonomian daerah dengan mengeluarkan dua subkategori yang termasuk dalam *unrenewable resources* (sektor tak terbarukan), yakni migas dan batu bara, perhitungan ini diasumsikan lebih mendekati pada kondisi riil gambaran kinerja perekonomian daerah, khususnya terkait dengan pencapaian proses transformasi ekonomi daerah dari dominasi komoditas tak terbarukan menuju optimalisasi komoditas terbarukan. Pada perhitungan ini laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai

Kartanegara senantiasa bergerak positif, namun trend tiga tahun terakhir cenderung meningkat pesat, yang terlihat pada tahun 2016 sebesar 1,62 persen mengalami peningkatan menjadi 5,73 persen pada tahun 2017 dan mencapai titik tertinggi dalam tiga tahun terakhir yakni sebesar 6,49 persen pada tahun 2018.

Dampak sosial dan ekonomi yang melanda Indonesia akibat pandemi Covid-19 memaksa semua level pemerintahan baik pusat dan daerah untuk melakukan koreksi terhadap rencana pembangunan yang telah ditetapkan. Terutama yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran mengingat saat menyusun sama sekali tidak memperhitungkan pandemi. Penyesuaian yang tepat dan kebijakan yang terukur dalam menangani wabah corona akan menjadi titik awal untuk pemulihan.

Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, bahwa hasil evaluasi asumsi pendapatan Tahun 2020 mengalami penurunan dari asumsi awal APBD Tahun 2020, mengharuskan Pemerintah daerah melakukan penyesuaian terhadap Peraturan tersebut. Selain itu dengan terbitnya Surat Keputusan Bersama Mendagri dan Menkeu, Nomor $\frac{119/2813/SJ}{177/KMK.07/2020}$, Tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan COVID-19 Serta Pengmanana Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional (Rasionalisasi 50% dari Barjas dan Modal), maka Pemerintah Daerah perlu menelaah ulang terkait target-target makro ekonomi daerah dengan menyesuaikan hasil evaluasi yang sampai dengan Triwulan II.

Penanganan pandemi Covid-19 mengubah rencana dan strategi pembangunan berbagai sektor yang telah ditetapkan, salah

satunya target pembangunan yang berubah seiring dengan perubahan proses kerja. Berdasarkan atas pemutahiran data perekonomian daerah tahun 2019 dan proyeksi Triwulan II tahun 2020 diasumsikan akan bergerak negatif, baik migas maupun non migas, hal ini berdasarkan penurunan perekonomian nasional yang secara umum diakibatkan Pandemi Covid-19 dan ini akan memberikan dampak bagi perekonomian Kutai Kartanegara, terutama terhadap eksistensi komoditas ekspor Kutai Kartanegara. Di lain sisi penguatan sektor-sektor ekonomi yang memiliki daya dorong yang kuat terhadap pertumbuhan ekonomi daerah seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri pengolahan dan sektor jasa lainnya, diperkirakan akan bergerak positif seiring dengan kebijakan pengembangan pertanian dan pariwisata yang terus dipacu. Atas dasar tersebut dengan skenario optimistik perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara secara umum digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 2.2.

Target Kinerja Perekonomian Kutai Kartanegara 2020

No	Sasaran Ekonomi Makro	KUTAI KARTANEGARA		KALIMANTAN TIMUR		NASIONAL	
		Sebelum	Kondisi Covid-19	Sebelum	Kondisi Covid-19	Sebelum	Kondisi Covid-19
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	2,35	-1,34 - 0,02	3,5±1	-1,38-0,76	5,3 - 5,5	-0,4 - 1%
2	Laju Inflasi (%)	3,5 - 3,7	3% (±1%)	3,0	3,0-4,0	3% (±1%)	2,0-4,0
3	Investasi (trilyun Rp.)	n.a	n.a	33,08	33,08	886	817
4	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	73,68	74.18	>76,61	76,66	72,5	72,78 – 72,90
5	Gini Rasio	0,273	0.32	0,329	0,329	0,375 – 0,380	0,377 – 0,379
6	Tingkat Kemiskinan (%)	6,87	7.56	5,94	7,09	8,5 – 9,0	9,7 - 10,2
7	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,08	7.11	6 -5	9,04	4,8 – 5,1	7,8 - 8,5

Sumber : data olahan, BPS

b. PENDAPATAN

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah

meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Perubahan kebijakan pendapatan daerah pada APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020 disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi realisasi pendapatan daerah sampai dengan triwulan II Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019.

Dalam perspektif perencanaan pembangunan daerah, salah satu instrumen pendorong pertumbuhan ekonomi adalah belanja pemerintah (government expenditure), dan sebaliknya kecenderungan pergerakan kinerja perekonomian daerah mempengaruhi penerimaan pemerintah daerah. Sebagai daerah dengan struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian, maka kerangka keuangan daerah saat ini masih didominasi oleh pendapatan yang bersumber dari dana bagi hasil pertambangan dan penggalian khususnya komoditas minyak dan gas bumi serta batu bara.

Untuk perubahan APBD tahun 2020 secara umum pendapatan daerah mengalami penurunan. PAD, sebelum perubahan sebesar ditargetkan sebesar 464,097,116,709.86 mengalami koreksi sehingga menjadi Rp359.628.799.466,57 atau berkurang sebesar Rp104.468.317.243,29. Dari 4 (empat) jenis pendapatan PAD, hanya pendapatan pajak daerah yang mengalami peningkatan. Sedangkan hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang Sah mengalami penurunan. Secara garis besar PAD, perubahan APBD tahun 2020 tergambar pada tabel berikut.

Tabel 2.1.
Alokasi Dana Pendapatan Asli Daerah (PAD)
pada Perubahan APBD Tahun 2020.

NO.	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
4.	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	Pendapatan Asli Daerah				
4.1.1	Hasil Pajak Daerah	67.252.468.248,00	70.497.091.920,50	3.244.623.672,50	4,82%
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	6.163.955.615,00	5.734.929.075,00	(429.026.540,00)	-6,96%
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	106.433.524.450,00	74.438.368.752,43	(31.995.155.697,57)	-30,06%
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	284.247.168.396,86	208.958.409.718,64	(75.288.758.678,22)	-26,49%
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	464.097.116.709,86	359.628.799.466,57	(104.468.317.243,29)	-22,51%

Dana Perimbangan yang merupakan komponen terbesar dalam pendapatan daerah mengalami penurunan, baik pada komponen Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) hingga Dana Alokasi Khusus (DAK) berdasarkan ketentuan perundang-undangan, diantaranya yaitu PMK Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.07/2019 Tentang Penetapan Kurang Bayar & Lebih Bayar DBH Menurut Daerah Prov/Kab/Kota Pada Tahun 2019, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2020 Tentang Kurang Bayar DBH Pada TA 2020 hingga Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.07/2020.

Adapun perubahan dana perimbangan tahun 2020 secara ringkas tergambar pada tabel berikut.

Tabel 2.2.
Alokasi dana Perimbangan pada
Perubahan APBD Tahun 2020

NO.	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
4.2	Dana Perimbangan				
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	3.461.122.777.017,00	2.517.762.109.934,42	(943.360.667.082,58)	-27,26%
4.2.2	Dana Alokasi Umum	503.416.743.000,00	452.961.957.000,00	(50.454.786.000,00)	-10,02%
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	446.923.338.000,00	398.037.373.000,00	(48.885.965.000,00)	-10,94%
	Jumlah Dana Perimbangan	4.411.462.858.017,00	3.368.761.439.934,42	(1.042.701.418.082,58)	-23,64%

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak dari alokasi awal berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 dan PMK Nomor 140/PMK.07/2019 Tentang Rincian Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang dialokasikan dalam APBN Tahun Anggaran 2019, dan PMK Nomor 20/PMK.07/2020 Tentang Kurang Bayar DBH Pada TA 2020 serta PMK Nomor 113/PMK.07/2020, dimana pada APBD 2020 sebesar Rp3.461.122.777.017,00 dan setelah perubaha menjadi Rp 2.517.762.109.934,42 atau berkurang sebesar Rp943.360.667.082,58.
2. Pos Dana Alokasi Umum, diasumsikan mengalami perubahan berupa penurunan sehingga menjadi Rp452,961,957,000.00 atau berkurang sebesar Rp50.454.786.000,00.
3. Dana Alokasi Khusus mengalami penurunan dari Alokasi awal APBD tahun 2020 sebesar minus Rp48,885,965,000.00 sehingga menjadi Rp398.037.373.000,00.

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, pada pendapatan ini terdiri atas pendapatan hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya, terjadi penurunan. Untuk Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya sebesar minus Rp147.772.975.000,00 atau menjadi sebesar Rp246.095.921.000,00 dan Bantuan Keuangan sebesar minus Rp7.605.000.000,00 sehingga menjadi Rp.116.305.000.000,00. Alokasi tersebut sesuai dengan Surat Gubernur Nomor : Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 900/ 5220/1581-III/BPKAD, Surat Gubernur Nomor : 978/5203/1574-III/BPKAD,. Hasil Klarifikasi Bantuan Keuangan terhadap Kabupaten Kutai Kartanegara Perubahan APBD TA.2020.

Sedangkan dana penyesuaian dan otonomi khusus mengalami penurunan sebesar minus Rp4.525.703.000,00. Penurunan tersebut berasal dari pengurangan pagu alokasi dana desa (DD) dan dana insentif daerah (DID) sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020.

Sedangkan Pendapatan Hibah yang merupakan Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pemerintah masih diasumsikan sama dengan sebelum perubahan. Hal ini dikarenakan masih belum adanya informasi resmi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Secara garis besar Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada perubahan APBD 2020 tergambar pada tabel berikut.

Tabel 2.3.
Alokasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
pada Perubahan APBD 2020

4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah				
4.3.1	Pendapatan Hibah	98.619.700.000,00	98.619.700.000,00	-	0,00%
4.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya	393.868.896.000,00	246.095.921.000,00	(147.772.975.000,00)	-37,52%
4.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	206.981.609.000,00	202.455.906.000,00	(4.525.703.000,00)	-2,19%
4.3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	123.910.000.000,00	116.305.000.000,00	(7.605.000.000,00)	-6,14%
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	823.380.205.000,00	663.476.527.000,00	(159.903.678.000,00)	-19,42%

c. BELANJA

Merupakan alokasi belanja daerah, yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Total Belanja Perubahan APBD Tahun 2020 adalah sebesar Rp6.029.565.268.824,89 dan jika dibandingkan dengan anggaran pada APBD Tahun 2020, bertambah sebesar Rp.55.625.089.098,03.

Belanja Tidak Langsung dialokasikan sebesar Rp.2.636.665.018.754,80 naik sebesar Rp93.043.484.598,80 atau dengan prosentase 3,66%%.

Kebijakan Belanja Tidak Langsung :

1. Belanja Pegawai turun sebesar Rp77.681.001.000,00 sehingga menjadi Rp1.706.657.209.918,00. Pengurangan ini salah satunya berasal dari alokasi tambahan penghasilan khusus guru yang bersumber dari DAK Non Fisik.
2. Belanja Hibah mengalami perubahan sebesar Rp2.669.550.000,00 sehingga menjadi Rp153.965.740.850,00. Alokasi tersebut diperuntukan Hibah KPU dan Hibah BOSKAB.
3. Belanja Bantuan Sosial tidak mengalami perubahan sehingga masih sebesar Rp2.867.000.000,00.
4. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik mengalami penurunan sebesar sehingga menjadi Rp593.186.013.388,00. Hal ini disebabkan karena penyesuaian terhadap asumsi Pendapatan Daerah.
5. Belanja Tidak Terduga mengalami kenaikan 1699,89% sebesar Rp179.989.054.598,80. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2020, BTT telah dialokasikan mendahului perubahan APBD bertambah sebesar

Rp119.996.639.838,80. Selanjutnya dialokasikan tambahan sebesar Rp50.000.000.000,00.

Hal ini dalam rangka menindaklanjuti masa tanggap darurat COVID-19 sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden No 11 tahun 2020 dan Surat Edaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 6 Tahun 2020.

Kebijakan Belanja Langsung :

1. Dengan mempedomani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka Pemerintah mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Refocussing kegiatan, dan realokasi anggaran) dengan mengaju pada protokol penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
2. Mempedomani Surat Keputusan Bersama Mendagri dan Menkeu Nomor : $\frac{119/2813/SJ}{177/KMK.07/2020}$, Tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan COVID-19 Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.
3. Merasionalisasi dan menjadwalkan ulang capaian program dan kegiatan tahun 2020, terhadap belanja pegawai, belanja barang/jasa, serta belanja modal, dengan Pertimbangan Penajaman Program dan Kegiatan.
4. Melakukan pergeseran/penambahan/pengurangan alokasi belanja program/kegiatan yang disesuaikan dengan pencapaian target program/kegiatan berdasarkan atas prioritas dan kapasitas keuangan daerah.

5. Alokasi Belanja Langsung mengalami penurunan sebesar Rp37.418.395.500,77 sehingga menjadi Rp3.392.900.250.070,09.

Dari uraian belanja sebagaimana dimaksud di atas, juga dapat disusun beberapa hal sebagai berikut :

1. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan Prioritas Pembangunan Nasional.

Tabel 2.4

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2020 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2020 Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Prioritas Pembangunan Nasional

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan Perubahan APBD				Jumlah
		Belanja Langsung		Belanja Tidak Langsung		
		Uraian	Rp.	Uraian	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7=4+6
1	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan					425.990.847.444,25
		Program Pendidikan Anak Usia Dini	9.909.155.700,00	Belanja Hibah Tutor PAUD	12.018.000.000,00	21.927.155.700,00
		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	186.396.581.048,00	Belanja Hibah Subsidi Pendidikan	1.414.100.000,00	187.810.681.048,00
		Program Pendidikan Non Formal	5.455.860.380,00	Belanja Hibah Dana BOS Kabupaten	19.533.050.000,00	24.988.910.380,00
		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	8.968.900.000,00			8.968.900.000,00
		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1.282.216.173,00			1.282.216.173,00
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	49.453.984.600,00			49.453.984.600,00
		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	868.772.800,00			868.772.800,00

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan Perubahan APBD				Jumlah
		Belanja Langsung		Belanja Tidak Langsung		
		Uraian	Rp.	Uraian	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7=4+6
		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	11.348.846.137,00			11.348.846.137,00
		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	3.678.713.600,00			3.678.713.600,00
		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	3.641.483.886,00			3.641.483.886,00
		Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	34.788.882.195,00			34.788.882.195,00
		Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	39.931.195.965,25			39.931.195.965,25
		Program Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi	4.587.329.180,00			4.587.329.180,00
		Program Penanggulanga n Kemiskinan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	2.400.000.000,00			2.400.000.000,00
		Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	10.608.545.800,00			10.608.545.800,00
		Program Pengembangan Usaha Mikro Masyarakat Miskin Produktif	350.000.000,00			350.000.000,00
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	4.475.000.000,00			4.475.000.000,00
		Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	316.742.978,00			316.742.978,00
		Program Penanggulanga n Kemiskinan Bidang Perkebunan	343.329.002,00			343.329.002,00
		Program Penanggulanga n Kemiskinan Bidang Peternakan	1.010.000.000,00			1.010.000.000,00
		Program Penanganan Fakir Miskin	2.014.626.000,00			2.014.626.000,00
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	2.166.000.000,00	Santunan Veteran dan Janda Veteran	1.467.000.000,00	3.633.000.000,00

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan Perubahan APBD				Jumlah
		Belanja Langsung		Belanja Tidak Langsung		
		Uraian	Rp.	Uraian	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7=4+6
				Bantuan Sosial Tidak Terencana	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00
		Program Pemberdayaan Sosial	1.820.532.000,00			1.820.532.000,00
		Program Rehabilitasi Sosial Bagi PMKS	2.342.000.000,00			2.342.000.000,00
		Program Bedah Rumah	2.000.000.000,00			2.000.000.000,00
2	Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah					683.505.565.426,91
		Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	40.515.194.389,26			40.515.194.389,26
		Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan	411.124.457.297,47			411.124.457.297,47
		Program Pengembangan Infrastruktur Daerah	2.499.891.050,00			2.499.891.050,00
		Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	1.658.923.691,00			1.658.923.691,00
		Program Perencanaan Tata Ruang	18.993.726.170,00			18.993.726.170,00
		Program Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	9.261.236.265,00			9.261.236.265,00
		Program Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan	199.452.136.564,18			199.452.136.564,18
3	Nilai Tambah Sektor Riil Industrialisasi dan Kesempatan Kerja					34.061.182.274,40
		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	452.810.000,00		-	452.810.000,00
		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro	890.000.000,00		-	890.000.000,00

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan Perubahan APBD				Jumlah
		Belanja Langsung		Belanja Tidak Langsung		
		Uraian	Rp.	Uraian	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7=4+6
		Kecil Menengah				
		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	740.000.000,00		-	740.000.000,00
		Program pengembangan pemasaran pariwisata	4.848.470.734,40		-	4.848.470.734,40
		Program pengembangan destinasi pariwisata	4.760.290.185,00		-	4.760.290.185,00
		Program pengembangan Kemitraan	476.844.635,00		-	476.844.635,00
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	3.863.000.000,00		-	3.863.000.000,00
		Program Pembinaan Industri Pariwisata	826.150.000,00		-	826.150.000,00
		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	1.740.000.000,00		-	1.740.000.000,00
		Program pengembangan industri kecil dan menengah	7.368.760.000,00		-	7.368.760.000,00
		Program Perluasan Komoditas Perkebunan	7.504.856.720,00		-	7.504.856.720,00
		Program Pembinaan Pemberdayaan dan Perluasan Kesempatan Kerja	590.000.000,00		-	590.000.000,00
		4	Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup			
		Program Peningkatan Produksi & Produktifitas Perikanan	32.729.322.303,69		-	32.729.322.303,69
		Program Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Sistem Distribusi Pangan	2.774.000.000,00		-	2.774.000.000,00
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	5.633.326.950,00		-	5.633.326.950,00

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan Perubahan APBD				Jumlah
		Belanja Langsung		Belanja Tidak Langsung		
		Uraian	Rp.	Uraian	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7=4+6
		(DLHK)				
		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	5.195.700.130,00		-	5.195.700.130,00
		Program Rehabilitasi Lahan Kritis	2.746.000.000,00		-	2.746.000.000,00
		Program Pemeliharaan, Pengelolaan dan Pengendalian Hasil Hutan Non Kayu, Taman Hutan raya dan Pelestarian Lingkungan	3.004.473.000,00		-	3.004.473.000,00
		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	32.504.636.103,85		-	32.504.636.103,85
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air	22.695.599.280,00		-	22.695.599.280,00
		Program peningkatan produksi hasil peternakan	7.819.515.243,00		-	7.819.515.243,00
		Program Revolusi Jagung	8.999.868.000,00		-	8.999.868.000,00
		Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian	35.225.570.449,78		-	35.225.570.449,78
		Program peningkatan penerapan teknologi pertanian	5.940.646.499,96		-	5.940.646.499,96
		Program Pengembangan Komoditas Spesifik Lokasi/Tanaman Lokal	150.000.000,00		-	150.000.000,00
		Program Perluasan Komoditas Perkebunan	7.704.856.720,00		-	7.704.856.720,00
		Program peningkatan produksi perkebunan	9.813.608.008,00		-	9.813.608.008,00

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan Perubahan APBD				Jumlah
		Belanja Langsung		Belanja Tidak Langsung		
		Uraian	Rp.	Uraian	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7=4+6
		Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan	1.227.979.000,00		-	1.227.979.000,00
		Program Pemanfaatan Sumber Air Bawah Tanah	1.910.000.000,00		-	1.910.000.000,00
		Program Pembinaan dan Pengembangan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi	170.646.200,00		-	170.646.200,00
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	154.685.486.649,16		-	154.685.486.649,16
		Program Ruang Terbuka Hijau	3.200.000.000,00		-	3.200.000.000,00
5	Stabilitas Pertahanan dan Keamanan					17.480.880.590,00
		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (Kesbangpol)	299.838.100,00		-	299.838.100,00
		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1.946.421.040,00		-	1.946.421.040,00
		Program Pendidikan Politik Masyarakat (Kesbangpol)	2.531.963.650,00		-	2.531.963.650,00
		Program Pencegahan Dini dan Penanggulanga n Korban Bencana Alam	1.349.253.000,00		-	1.349.253.000,00
		Program Tanggap Darurat Penanggulanga n Bencana	1.888.600.000,00		-	1.888.600.000,00
		Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	4.338.000.000,00		-	4.338.000.000,00
		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (Satpol PP)	748.604.400,00		-	748.604.400,00

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan Perubahan APBD				Jumlah
		Belanja Langsung		Belanja Tidak Langsung		
		Uraian	Rp.	Uraian	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7=4+6
		Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	3.693.552.000,00		-	3.693.552.000,00
		Program Pembinaan dan Penegakan Produk Hukum Daerah	484.648.400,00		-	484.648.400,00
		Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	200.000.000,00		-	200.000.000,00

2. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

Tabel 2.5

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2020 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2020 Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Prioritas Pembangunan Provinsi.

No.	Prioritas Pembangunan Provinsi	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan Perubahan APBD				Jumlah
		Belanja Langsung		Belanja Tidak Langsung		
		Uraian	Rp.	Uraian	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7=4+6
1	Pemerataan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan					755.608.625.376,26
		Program Pendidikan Anak Usia Dini	9.909.155.700,00	Belanja Hibah Tutor PAUD	12.018.000.000,00	21.927.155.700,00
		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	186.396.581.048,00	Belanja Hibah Subsidi Pendidikan	1.414.100.000,00	187.810.681.048,00
		Program Pendidikan Non Formal	5.455.860.380,00	Belanja Hibah Dana BOS Kabupaten	19.533.050.000,00	24.988.910.380,00
		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga	8.968.900.000,00		-	8.968.900.000,00

No.	Prioritas Pembangunan Provinsi	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan Perubahan APBD				Jumlah
		Belanja Langsung		Belanja Tidak Langsung		
		Uraian	Rp.	Uraian	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7=4+6
		Kependidikan				
		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1.282.216.173,00		-	1.282.216.173,00
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	49.453.984.600,00		-	49.453.984.600,00
		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	868.772.800,00		-	868.772.800,00
		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	3.678.713.600,00		-	3.678.713.600,00
		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	3.641.483.886,00		-	3.641.483.886,00
		Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	34.788.882.195,00		-	34.788.882.195,00
		Program Pengendalian Penyakit dan Surveilans	583.585.549,00			583.585.549,00
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	2.032.052.800,00			2.032.052.800,00
		Program Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Bencana/Wabah	469.089.000,00			469.089.000,00
		Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	52.103.711.713,00		-	52.103.711.713,00
		Program obat dan perbekalan Kesehatan	11.348.846.137,00			11.348.846.137,00
		Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi	4.587.329.180,00			4.587.329.180,00
		Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata (RSU. AM. Parikesit)	44.754.844.037,00			44.754.844.037,00

No.	Prioritas Pembangunan Provinsi	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan Perubahan APBD				Jumlah
		Belanja Langsung		Belanja Tidak Langsung		
		Uraian	Rp.	Uraian	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7=4+6
		Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD (RSUD AM. Parikesit)	191.000.000.000,00			191.000.000.000,00
		Program Peningkatan Pelayanan Medis, Paramedis dan Non Medis (RSU ABADI)	15.537.888.671,00			15.537.888.671,00
		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan (RSU ABADI)	212.437.400,00			212.437.400,00
		Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD (ABADI)	38.329.438.449,84			38.329.438.449,84
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan (RSUD ABADI)	6.093.697.800,00			6.093.697.800,00
		Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata. (RSUD ABADI)	1.350.000.000,00			1.350.000.000,00
		Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD (DAYAKU RAJA)	19.019.071.592,42			19.019.071.592,42
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat (RSUD DAYAKU RAJA)	89.465.000,00			89.465.000,00
		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan (RSUD DAYAKU RAJA)	7.164.792.400,00			7.164.792.400,00
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan (RSUD DAYAKU RAJA)	800.000.000,00			800.000.000,00
		Program kemitraan pelayanan kesehatan (RSUD DAYAKU RAJA)	2.550.000.000,00			2.550.000.000,00
		Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata. (RSUD DAYAKU RAJA)	15.907.753.265,00			15.907.753.265,00

No.	Prioritas Pembangunan Provinsi	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan Perubahan APBD				Jumlah
		Belanja Langsung		Belanja Tidak Langsung		
		Uraian	Rp.	Uraian	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7=4+6
		Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata (RSUD DAYAKU RAJA)	4.264.922.000,00			4.264.922.000,00
2	Pengembangan Pendidikan Vokasi dan Kejuruan Berbasis Teknologi					
3	Penguatan Peran dan Kapasitas Ekonomi Kerakyatan					127.720.867.202,47
		Program Revolusi Jagung	8.999.868.000,00		-	8.999.868.000,00
		ProgramProgram Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian	35.225.570.449,78		-	35.225.570.449,78
		Program peningkatan produksi hasil peternakan	7.819.515.243,00		-	7.819.515.243,00
		Program Pemberdayaan dan Pengembangan Sumberdaya Masyarakat KP	2.907.828.600,00		-	2.907.828.600,00
		Program Peningkatan Produksi & Produktifitas Perikanan	32.729.322.303,69		-	32.729.322.303,69
		Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian	509.306.000,00		-	509.306.000,00
		Peningkatan Produksi Perkebunan	9.813.608.008,00		-	9.813.608.008,00
		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan	600.062.000,00		-	600.062.000,00
		Program Perluasan Komoditas Perkebunan	7.704.856.720,00		-	7.704.856.720,00
		Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	7.619.515.243,00		-	7.619.515.243,00

No.	Prioritas Pembangunan Provinsi	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan Perubahan APBD				Jumlah
		Belanja Langsung		Belanja Tidak Langsung		
		Uraian	Rp.	Uraian	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7=4+6
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	3.863.000.000,00		-	3.863.000.000,00
		Program Pengembangan Kemitraan	476.844.635,00		-	476.844.635,00
		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	740.000.000,00		-	740.000.000,00
		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	890.000.000,00		-	890.000.000,00
		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	452.810.000,00		-	452.810.000,00
		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	7.368.760.000,00		-	7.368.760.000,00
4	Pemerataan dan Peningkatan Konektivitas Pusat-Pusat Produksi					479.789.445.217,73
		Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	40.515.194.389,26		-	40.515.194.389,26
		Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan	411.124.457.297,47		-	411.124.457.297,47
		Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	1.658.923.691,00		-	1.658.923.691,00
		Program Perencanaan Tata Ruang	18.993.726.170,00		-	18.993.726.170,00
		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	4.997.252.620,00		-	4.997.252.620,00
		Program Pengembangan Infrastruktur Daerah	2.499.891.050,00		-	2.499.891.050,00
5	Peningkatan Ketahanan Sumberdaya Air, Energi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup					33.945.924.610,00

No.	Prioritas Pembangunan Provinsi	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan Perubahan APBD				Jumlah
		Belanja Langsung		Belanja Tidak Langsung		
		Uraian	Rp.	Uraian	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7=4+6
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air	22.695.599.280,00		-	22.695.599.280,00
		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	5.195.700.130,00		-	5.195.700.130,00
		Program Rehabilitasi Lahan Kritis	2.746.000.000,00		-	2.746.000.000,00
		Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan	1.227.979.000,00		-	1.227.979.000,00
		Program Pemanfaatan Sumber Air Bawah Tanah	1.910.000.000,00		-	1.910.000.000,00
		Program Pembinaan dan Pengembangan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi	170.646.200,00		-	170.646.200,00
6	Peningkatan Tata Kelola dan Kapasitas Pemerintah Daerah					88.240.815.340,58
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Kabupaten)	4.560.978.087,00		-	4.560.978.087,00
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1.310.000.000,00		-	1.310.000.000,00
		Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah (Bapenda)	700.000.000,00		-	700.000.000,00
		Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah (BPKAD)	9.888.123.910,00		-	9.888.123.910,00
		Program Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Aset daerah	5.201.432.692,00		-	5.201.432.692,00
		Program Pembinaan dan Pengelolaan Kearsipan	1.081.740.600,00		-	1.081.740.600,00
		Program Keserasian Kebijakan Kependudukan	11.827.147.190,00		-	11.827.147.190,00

No.	Prioritas Pembangunan Provinsi	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan Perubahan APBD				Jumlah
		Belanja Langsung		Belanja Tidak Langsung		
		Uraian	Rp.	Uraian	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7=4+6
		Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	6.247.178.900,00		-	6.247.178.900,00
		Program peningkatan sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH (inspektorat)	8.492.506.300,00		-	8.492.506.300,00
		Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan (Setkab)	1.700.000.000,15		-	1.700.000.000,15
		Program peningkatan sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH (Setkab)	4.047.412.127,13		-	4.047.412.127,13
		Program Peningkatan Pelayanan Publik (Setkab)	19.713.620.080,00		-	19.713.620.080,00
		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	10.793.178.800,30		-	10.793.178.800,30
		Program Pemantapan Reformasi Birokrasi	2.677.496.654,00		-	2.677.496.654,00

3. Alokasi Anggaran Pemerintah Kabupaten berdasarkan Prioritas Daerah

Tabel 2.6
ALOKASI PERUBAHAN ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA BERDASARKAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
DAERAH TAHUN 2020

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan Perubahan APBD				Jumlah
		Belanja Langsung		Belanja Tidak Langsung		
		Uraian	Rp.	Uraian	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7=4+6
1	Penyelenggaraan reformasi birokrasi melalui peningkatan kompetensi sumber daya aparatur, integrasi data dan layanan berbasis teknologi dan informasi					73.622.844.943,66
		Urusan Penunjang Pemerintahan				
		Program Pemantapan Reformasi Birokrasi	2.677.496.654,00		-	2.677.496.654,00
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.560.978.087,00		-	4.560.978.087,00
		Program Peningkatan Pelayanan Publik	19.713.620.080,00		-	19.713.620.080,00
		Program perencanaan, pengendalian pembangunan daerah	4.421.854.000,00		-	4.421.854.000,00
		Program Penelitian Umum	1.390.325.000,00		-	1.390.325.000,00
		Program Sistem Inovasi Daerah	160.000.000,00		-	160.000.000,00
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Kabupaten)	4.560.978.087,00		-	4.560.978.087,00
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1.310.000.000,00		-	1.310.000.000,00
		Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah (Bapenda)	700.000.000,00		-	700.000.000,00
		Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah (BPKAD)	9.888.123.910,00		-	9.888.123.910,00
		Program Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Aset daerah	5.201.432.692,00		-	5.201.432.692,00

No	Prioritas Pembanguna n Provinsi	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan Perubahan APBD				Jumlah
		Belanja Langsung		Belanja Tidak Langsung		
		Uraian	Rp.	Uraian	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7=4+6
		Urusan Kearsipan				
		Program Pembinaan dan Pengelolaan Kearsipan	1.081.740.600,00		-	1.081.740.600,00
		Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil				
		Program Penataan Administrasi Kependudukan	3.561.213.000,00		-	3.561.213.000,00
		Urusan Komunikasi dan Informasi				
		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	5.841.171.764,00		-	5.841.171.764,00
		Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	6.422.178.900,00		-	6.422.178.900,00
		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	666.768.300,00		-	666.768.300,00
		Program Penguatan Kelembagaan Komunikasi	1.464.963.869,66		-	1.464.963.869,66
2	Pembanguna n manusia melalui peningkatan kualitas layanan dasar dan penurunan kemiskinan					946.107.472.620,42
		Urusan Pendidikan				-
		Program Pendidikan Anak Usia Dini	9.909.155.700,00	Belanja Hibah Tutor PAUD	12.018.000.000,00	21.927.155.700,00
		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	186.396.581.048,00	Belanja Hibah Subsidi Pendidikan	1.414.100.000,00	187.810.681.048,00
		Program Pendidikan Non Formal	5.455.860.380,00	Belanja Hibah Dana BOS Kabupaten	19.533.050.000,00	24.988.910.380,00
		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	8.968.900.000,00			8.968.900.000,00
		Urusan Perpustakaan				
		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1.282.216.173,00		-	1.282.216.173,00

No	Prioritas Pembanguna n Provinsi	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan Perubahan APBD				Jumlah	
		Belanja Langsung		Belanja Tidak Langsung			
		Uraian	Rp.	Uraian	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7=4+6	
		Urusan Kesehatan				-	
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	49.453.984.600,00			-	49.453.984.600,00
		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	868.772.800,00			-	868.772.800,00
		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	3.678.713.600,00			-	3.678.713.600,00
		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	3.641.483.886,00			-	3.641.483.886,00
		Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	34.788.882.195,00			-	34.788.882.195,00
		Program Pengendalian Penyakit dan Surveilans	583.585.549,00			-	583.585.549,00
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	2.032.052.800,00			-	2.032.052.800,00
		Program Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Bencana/Wabah	469.089.000,00			-	469.089.000,00
		Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	52.103.711.713,00			-	52.103.711.713,00
		Program obat dan perbekalan Kesehatan	11.348.846.137,00			-	11.348.846.137,00
		Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi	4.587.329.180,00			-	4.587.329.180,00
		Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata (RSU. AM. Parikesit)	44.754.844.037,00				44.754.844.037,00
		Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD (RSUD AM. Parikesit)	191.000.000.000,00				191.000.000.000,00
		Program Peningkatan Pelayanan Medis, Paramedis dan Non Medis (RSU ABADI)	15.537.888.671,00			-	15.537.888.671,00
		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan (RSU ABADI)	212.437.400,00				212.437.400,00
		Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD (ABADI)	38.329.438.449,84				38.329.438.449,84

No	Prioritas Pembanguna n Provinsi	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan Perubahan APBD				Jumlah
		Belanja Langsung		Belanja Tidak Langsung		
		Uraian	Rp.	Uraian	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7=4+6
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan (RSUD ABADI)	6.093.697.800,00			6.093.697.800,00
		Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata. (RSUD ABADI)	1.350.000.000,00			1.350.000.000,00
		Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD (DAYAKU RAJA)	19.019.071.592,42			19.019.071.592,42
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat (RSUD DAYAKU RAJA)	89.465.000,00			89.465.000,00
		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan (RSUD DAYAKU RAJA)	7.164.792.400,00			7.164.792.400,00
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan (RSUD DAYAKU RAJA)	800.000.000,00			800.000.000,00
		Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan (RSUD DAYAKU RAJA)	2.550.000.000,00			2.550.000.000,00
		Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata. (RSUD DAYAKU RAJA)	15.907.753.265,00			15.907.753.265,00
		Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata (RSUD DAYAKU RAJA)	4.264.922.000,00			4.264.922.000,00
		Urusan Tenaga Kerja				
		Program Peningkatan Kompentensi Tenaga Kerja dan Produktifitas	1.250.805.625,00		-	1.250.805.625,00
		Program pembinaan pemberdayaan dan perluasan kesempatan kerja	590.000.000,00		-	590.000.000,00
		Urusan Kepemudaan Dan Olah Raga				
		Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	978.722.000,00		-	978.722.000,00
		Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	10.908.545.800,00		-	10.908.545.800,00
		Urusana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				-

No	Prioritas Pembanguna n Provinsi	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan Perubahan APBD				Jumlah
		Belanja Langsung		Belanja Tidak Langsung		
		Uraian	Rp.	Uraian	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7=4+6
		Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	790.465.000,00		-	790.465.000,00
		Urusan Wajib Sosial				-
		Program Penanganan Fakir Miskin	2.014.626.000,00			2.014.626.000,00
		Program Rehabilitasi Sosial Bagi PMKS	2.342.000.000,00		-	2.342.000.000,00
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	2.166.000.000,00	Santunan Veteran dan Janda Veteran	1.467.000.000,00	3.633.000.000,00
				Bantuan Sosial Tidak Terencana	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00
		Program Pemberdayaan Sosial	1.820.532.000,00		-	1.820.532.000,00
		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				-
		Program Pengembangan Usaha Mikro Masyarakat Miskin Produktif	350.000.000,00		-	350.000.000,00
		Urusan Pilihan Pertanian				-
		Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Peternakan	1.010.000.000,00		-	1.010.000.000,00
		Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Perkebunan	343.329.002,00		-	343.329.002,00
		Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan				
		Program Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	2.400.000.000,00			2.400.000.000,00
		Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				-
		Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	807.763.990,00		-	807.763.990,00
		Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman				-
		Program Bedah Rumah	2.000.000.000,00		-	2.000.000.000,00

No	Prioritas Pembanguna n Provinsi	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan Perubahan APBD				Jumlah
		Belanja Langsung		Belanja Tidak Langsung		
		Uraian	Rp.	Uraian	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7=4+6
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	154.685.486.649,16		-	154.685.486.649,16
		Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	93.600.000,00		-	93.600.000,00
		Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	772.310.100,00		-	772.310.100,00
		Program Pemenuhan hak - hak anak	819.000.000,00		-	819.000.000,00
		Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	316.742.978,00		-	316.742.978,00
		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	1.171.918.100,00		-	1.171.918.100,00
3	Peningkatan nilai tambah perekonomian daerah melalui pertanian, pariwisata dan peningkatan konektivitas antar wilayah					725.213.741.827,76
		Urusan Penanaman Modal				-
		Program Pengendalian Penanaman Modal	500.000.000,00		-	500.000.000,00
		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	1.740.000.000,00		-	1.740.000.000,00
		Program Peningkatan dan Kemudahan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	700.000.000,00		-	700.000.000,00
		Program Pengendalian Penanaman Modal	500.000.000,00		-	500.000.000,00
		Urusan Penunjang Keuangan				-
		Program Peningkatan PAD	3.931.447.500,00		-	3.931.447.500,00
		Urusan Pangan				

No	Prioritas Pembanguna n Provinsi	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan Perubahan APBD				Jumlah
		Belanja Langsung		Belanja Tidak Langsung		
		Uraian	Rp.	Uraian	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7=4+6
		Program Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Sistem Distribusi Pangan	2.774.000.000,00		-	2.774.000.000,00
		Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	32.504.636.103,85			32.504.636.103,85
		Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan				-
		Program Pemberdayaan dan Pengembangan Sumberdaya Masyarakat KP	2.907.828.600,00			2.907.828.600,00
		Program Peningkatan Produksi & Produktifitas Perikanan	32.729.322.303,69			32.729.322.303,69
		Urusan Pilihan Pertanian				-
		Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian	35.225.570.449,78			35.225.570.449,78
		Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian	509.306.000,00			509.306.000,00
		Program peningkatan penerapan teknologi pertanian	5.940.646.499,96			5.940.646.499,96
		Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	1.415.700.000,00			1.415.700.000,00
		Program peningkatan produksi hasil peternakan	7.819.515.243,00			7.819.515.243,00
		Program Revolusi Jagung	8.999.868.000,00			8.999.868.000,00
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Dan Sarana Pertanian	870.000.000,00			870.000.000,00
		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	406.512.000,00			406.512.000,00
Program Pengembangan Komoditas Spesifik Lokasi/Tanaman Lokal	150.000.000,00			150.000.000,00		

No	Prioritas Pembanguna n Provinsi	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan Perubahan APBD				Jumlah
		Belanja Langsung		Belanja Tidak Langsung		
		Uraian	Rp.	Uraian	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7=4+6
		Peningkatan Produksi Perkebunan	9.813.608.008,00			9.813.608.008,00
		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan	600.062.000,00			600.062.000,00
		Program Perluasan Komoditas Perkebunan	7.704.856.720,00			7.704.856.720,00
		Urusan Pilihan Pariwisata				-
		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	4.760.290.185,00			4.760.290.185,00
		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	4.848.470.734,40			4.848.470.734,40
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	3.863.000.000,00			3.863.000.000,00
		Program Pengembangan Kemitraan	476.844.635,00			476.844.635,00
		Program Pembangunan Sarana Prasarana Kepariwisataan	8.140.166.700,00			8.140.166.700,00
		Urusan Kebudayaan				-
		Program Pelestarian Cagar Budaya dan Budaya Daerah	5.295.000.000,00			5.295.000.000,00
		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				-
		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	740.000.000,00			740.000.000,00
		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	452.810.000,00			452.810.000,00
		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	890.000.000,00			890.000.000,00
		Urusan Perdagangan				-
		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	775.820.000,00			775.820.000,00
		Program Pemberdayaan dan Pengembangan Pasar	9.366.043.558,00			9.366.043.558,00
		Urusan Perindustrian				-
		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	7.368.760.000,00			7.368.760.000,00
		Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				-
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air	22.695.599.280,00			22.695.599.280,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan Perubahan APBD				Jumlah
		Belanja Langsung		Belanja Tidak Langsung		
		Uraian	Rp.	Uraian	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7=4+6
		Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan	411.124.457.297,47			411.124.457.297,47
		Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	40.515.194.389,26			40.515.194.389,26
		Program Pengendalian Banjir	15.312.803.009,35			15.312.803.009,35
		Program Perencanaan Tata Ruang	18.993.726.170,00			18.993.726.170,00
		Urusan Perhubungan				-
		Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana fasilitas LLAJ	4.997.252.620,00			4.997.252.620,00
		Program pembangunan sarana dan prasarana Perhubungan	1.658.923.691,00			1.658.923.691,00
		Urusan Lingkungan Hidup				-
		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	5.195.700.130,00			5.195.700.130,00

d. PEMBIAYAAN

Pembiayaan merupakan kondisi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, yang perlu dibayar kembali dan/atau yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan Pembiayaan Daerah, berdasarkan atas audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terkoreksi dan didapatlah nilai SiLPA sehingga Rp1.657.698.502.423,90 dari asumsi pada APBD Induk TA.2020 sebesar Rp275.000.000.000,00 serta dan digunakan kembali dalam kerangka belanja daerah sesuai dengan peruntukannya. Dalam pengeluaran pembiayaan, Pemerintah Daerah telah membentuk Tim Penilaian Investasi Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 368/SK-BUP/HK/2020 guna menindaklanjuti usulan untuk penyertaan modal sebesar Rp20.000.000.000,00 dari PDAM Tirta Mahakam.

Berikut secara umum gambaran perubahan pembiayaan tahun anggaran 2020.

Tabel 2.6.
Perubahan Asumsi Pembiayaan Tahun 2020

NO.	URAIAN	APBD TA.2020	Penetapan KUA Perubahan APBD-PPAS Perubahan TA.2020	SELISIH	%
6.	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah				
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	275.000.000.000,00	1.657.698.502.423,90	1.382.698.502.423,90	502,80%
6.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah				
6.2.1	Penyertaan Modal	-	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	275.000.000.000,00	1.637.698.502.423,90	1.362.698.502.423,90	495,53%
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00	-	(0,00)	

BAB III

PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2020 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS-APBD) Tahun Anggaran 2020 dan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020..

Tenggarong, 16 September 2020
BUPATI KUTAI KARTANEGARA



EDI DAMANSYAH